

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep efikasi politik telah memainkan peran penting dalam studi tentang perilaku politik dan sosialisasi politik. Campbell, Gurin, dan Miller mendefinisikan efikasi politik sebagai perasaan/keyakinan individu bahwa tindakan politiknya dapat memberikan dampak pada proses politik.¹ Selain sosialisasi politik yang berhasil kepada masyarakat, efikasi politik memiliki kaitan yang erat dengan tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat.

Efikasi politik secara tradisional digunakan untuk menilai alasan di balik kecenderungan relatif seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Efikasi politik dibagi menjadi dua kategori: efikasi internal dan efikasi eksternal. Sullivan dan Riedel menyatakan efikasi politik internal individu sebagai keyakinan tentang dampak yang dapat terjadi pada proses politik sebagai akibat dari keterampilan dan kepercayaan dirinya. Sedangkan efikasi eksternal adalah keyakinan bahwa lembaga-lembaga politik akan responsif terhadap tindakan warga negara dalam proses politik atau keyakinan bahwa seseorang akan menjadi efektif ketika berpartisipasi dalam kehidupan politik.²

Tingginya kadar efikasi warga memilih biasanya dipandang sebagai sesuatu yang diinginkan untuk stabilitas demokrasi, karena dalam masyarakat modern yang demokratis, warga harus merasa bahwa mereka memiliki kekuatan untuk

¹ Morrel, E. Michael (2005). *Deliberation, Democratic Decision-Making and Internal Political Efficacy. Political Behavior*. Volume 27 No. 1. www.jstor.org/stable/4500184. Hlm 56

² Sharoni, Sari (2012). *E-Citizenship: Trust in Government, Political Efficacy and Political Participation in the Internet Era*. Hlm 122

mempengaruhi tindakan pemerintah mereka. Pada dasarnya, konsep efikasi politik tidak dapat dipisahkan dari konsep efikasi diri, yakni keyakinan individu mengenai kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu (dalam konteks politik). Individu dengan keyakinan tinggi terhadap kapasitas atau kemampuannya untuk ikut-serta dalam aksi politik diartikan bahwa ia aktif dalam partisipasi politik, sehingga masyarakat yang memiliki efikasi politik tinggi akan tinggi pula partisipasi politiknya.

Menurut Riedel dan Sullivan dalam kajian secara teoritis mengenai efikasi politik, ada dua faktor efikasi diri terhadap politik yaitu³: (1) Faktor Internal, adalah keyakinan seseorang bahwa dampak dari partisipasi tidak akan mempengaruhi dirinya dalam kehidupan politik. Contohnya pada saat agenda pemilihan umum dilaksanakan, anggapan dari masyarakat bahwa siapapun pemimpin yang terpilih akan mempengaruhi kehidupannya; (2) Faktor Eksternal, adalah persepsi masyarakat terhadap kinerja dari lembaga-lembaga pemerintahan. Contohnya anggapan dari masyarakat terhadap pemerintahan yang melakukan tindakan kriminal seperti korupsi, sehingga masyarakat beranggapan bahwa mereka hanya akan membuang-buang waktu di saat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Terjadinya dinamika politik dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan umum maupun pemilihan presiden. Keikutsertaan masyarakat turut menjadi perhatian dalam studi politik yang biasa disebut dengan partisipasi politik. Beberapa ilmuwan politik yang telah merumuskan konsep partisipasi politik seperti Ramlan Surbakti

³ Elis Anisah Fitriah (2014) . “*Personal Value and Internal Political Efficacy* terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula”. *Psymphathic, Jurnal Ilmiah Psikologi* Juni, Vol. 1, No.2,, Hlm.244-254.

maupun Samuel Huntington menyimpulkan tingginya partisipasi individu dalam bidang politik juga merupakan hasil dari *trust* atau rasa percaya mereka terhadap komponen-komponen sistem politik yang diberlakukan saat ini, salah satunya efikasi politik.

Efikasi internal yang tinggi atas kemampuan individu untuk berperan dalam sistem politik maupun mempengaruhi pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan akan mendorong seseorang untuk aktif berpartisipasi secara politik. Sebaliknya, efikasi politik yang rendah terhadap proses-proses politik termasuk masalah pemilu membuat individu merasa bahwa pilihan suara mereka tidak akan mengubah keadaan.⁴

Pembahasan partisipasi memilih masyarakat selalu dikaitkan dengan kesalahan sosialisasi dan gejala dinamika politik di suatu daerah. Seperti yang pernah dijelaskan dalam penelitian Elis Anisa Fitriah yang menekankan bahwasanya ada dua hal yang mempengaruhi partisipasi politik. Tingkat partisipasi warga dalam setiap pemilihan umum dikarenakan berbagai faktor, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Faktor eksternal terkait dengan situasi atau lingkungan politik yang dibangun oleh negara. Sedangkan, faktor internal adalah yang ada dalam diri individu, yang mengarahkan keinginan dan kebutuhan seseorang untuk mengambil peran dalam proses maupun kegiatan politik.⁵

Kesadaran mengenai pentingnya peran warga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara tidak hanya pada taraf pengetahuan politik,

⁴ Matulesy Andik (2013). *Political Efficacy, Political Trust dan Collective Self-Esteem* dengan Partisipasi dalam Gerakan Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Psikologi* 2013, Vol 4, No 6, Hlm 240.

⁵*Ibid.* Hlm 245.

melainkan harus tumbuh menjadi sebuah keyakinan bahwa dirinya dapat mempengaruhi atau berdampak pada proses politik negaranya. Keyakinan ini disebut *political efficacy* (efikasi politik).⁶

Tingkat partisipasi politik khususnya dalam perihal keikutsertaan masyarakat dalam memilih dapat diukur dari setiap pelaksanaan kontestasi politik. Hal yang menjadi fokus peneliti kali ini adalah partisipasi memilih pada masyarakat di Kota Bukittinggi. Partisipasi memilih masyarakat di Kota Bukittinggi dalam tiga kali Pilkada terakhir relatif rendah. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 mengenai persentase suara pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari tahun 2005-2020.

Tabel 1.1
Data Jumlah Persentase Suara dan Jumlah DPT Pada PEMILUKADA
Tahun 2005, 2010 dan 2015.

Tahun Pemilihan Pilkada	Agenda Pemilihan	Jumlah DPT	Partisipasi memilih	Persentase
2005	Pemilihan Gubernur	71.644	38.810	54,17 %
	Pemilihan Walikota	71.644	38.795	54,15 %
2010	Pemilihan Gubernur	70.359	43.264	61,49 %
	Pemilihan Walikota	70.359	43.254	61,48 %
2015	Pemilihan Gubernur	74.466	43.843	58,88 %
	Pemilihan Walikota	72.450	43.823	60,49 %

Sumber : KPU Kota Bukittinggi

⁶*Ibid.* Hlm 245-246.

Tabel di atas menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi memilih di Kota Bukittinggi pada setiap pemilihan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Di Sumatera Barat, sebagaimana di daerah lain di Indonesia, partisipasi memilih sering dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan, misalnya kedekatan sosial kerabat, pemahaman politik masyarakat, ataupun kesadaran politik yang sudah baik sehingga muncul rasionalitas-rasionalitas dalam memilih.

Menurut Milbrath ada 4 faktor yang menyebabkan orang berpartisipasi dalam kehidupan politik, meliputi (1) adanya rangsangan sehingga seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik, (2) karakteristik pribadi seseorang yang mempunyai perhatian dan kepedulian sosial yang besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, dan lainnya, (3) faktor karakteristik sosial seseorang, yaitu menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang dan (4) faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan yang kondusif membuat orang senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik.⁷

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori perilaku yakni Apatitis, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik, Spectator, yaitu berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam pemilu, Gladiator, yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik dan Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk konvensional.⁸

⁷ Milbrath, L (1965). *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?*. Chicago: Rand McNally College Publishing Company. American Political Science Review, No 4, Vol. 59. PP. 1026 – 1027 dalam jurnal.dikti.go.id .

⁸ Cholisin, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press. Hlm 152

Sejalan dengan pendapat tersebut, penelitian kali ini memfokuskan kepada partisipasi dalam jenis keikutsertaan dalam konteks pemilihan secara langsung.

Partisipasi memilih menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan. Pemilu dan demokrasi merupakan salah satu instrumen yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Tidaklah heran isu tinggi rendahnya angka partisipasi berkaitan dengan tingkat legitimasi dan kepercayaan warga kepada wakil mereka atau orang yang diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan.

Sebagai salah satu bagian dari keberlanjutan demokrasi, tingkat partisipasi memilih juga akan berdampak pada siapa yang akan memenangkan pemilihan umum dan mengatur kehidupan banyak orang. Oleh karena itu, sebagian negara-negara yang menganut demokrasi, termasuk Indonesia, menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pemilu khususnya dalam hal hadir atau tidaknya warga negara untuk memilih (*voter turnout*).⁹

Keterkaitan antara efikasi politik internal dengan partisipasi terlihat jelas dari variabel *political efficacy*. Dalam beberapa penelitian ditemukan keterkaitan yang signifikan dalam partisipasi dalam gerakan sosial dan politik, antara lain penelitian Mattulesy “*Political Efficacy, Political Trust dan Collective Self-Esteem* dengan

⁹ Stockemer Daniel, (2016). *What Affects Voter Turnout?*. Government and Opposition, Vol. 52, No. 4, pp. 698–722, 2017. Hlm 715-716.

Partisipasi dalam Gerakan Mahasiswa” Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara antara political efficacy dengan partisipasi dalam gerakan mahasiswa. Artinya semakin tinggi political efficacy maka semakin tinggi pula partisipasi dalam gerakan mahasiswa. Begitu juga sebaliknya.

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan partisipasi memilih lebih memfokuskan kepada variable seperti sosialisasi politik, variabel ekonomi masyarakat dll. Sedangkan penelitian merupakan penggunaan dan penggabungan konsep efikasi politik dan partisipasi memilih yang digunakan untuk mengetahui alasan tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kota Bukittinggi sehingga memunculkan ide untuk mengukur adanya pengaruh efikasi politik terhadap rendahnya partisipasi memilih di Kota Bukittinggi.

Hipotesis dalam penelitian ini menekankan adanya pengaruh dari efikasi politik terhadap rendahnya partisipasi memilih masyarakat di Kota Bukittinggi. Jika dilihat pada data tingkat partisipasi memilih di Kota Bukittinggi dari tahun ketahun, kecenderungan tingkat partisipasi politik masyarakat tergolong rendah. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti mengangkat judul penelitian “Pengaruh Efikasi Politik Terhadap Partisipasi Memilih pada Pilkada Di Kota Bukittinggi Tahun 2020.”

1.2. Rumusan Masalah

Melihat paparan yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, peneliti menduga bahwa rendahnya tingkat partisipasi memilih masyarakat di Kota Bukittinggi kemungkinan dipengaruhi oleh rendahnya efikasi politik masyarakat. Di Sumatera Barat, sebagaimana di daerah lain di Indonesia partisipasi politik seringkali

dilandasi oleh beberapa pertimbangan, misalnya kedekatan sosial kerabat, soal pemahaman politik masyarakat ataupun karena kesadaran politik yang sudah baik sehingga muncul rasionalitas-rasionalitas dalam memilih.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan realisasi dari diberlakukannya otonomi daerah. Sebelum otonomi daerah, kepala daerah biasanya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka dengan otonomi daerah sekarang ini, rakyat menjadi instrumen penting dalam demokrasi, salah satunya adalah dengan ikut terlibat dalam Pilkada secara langsung. Dengan pemilihan secara langsung rakyat akan memiliki kedaulatan penuh untuk mengekspresikan hak-hak politiknya. Pemilihan langsung juga merupakan salah satu cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terwujudnya aspirasi rakyat. Pilkada langsung tersebut antara lain, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.

Penelitian yang dilakukan Aidinil Zetra, dkk tentang kinerja demokrasi di Sumatra Barat menyimpulkan bahwa bangunan demokrasi di daerah ternyata lemah. Demokrasi tidak memiliki landasan terpentingnya yaitu partisipasi politik meskipun demokrasi prosedural mengalami berbagai perbaikan seperti kualitas penyelenggaraan pemilu dari satu pemilu ke pemilu lainnya, kebebasan mendirikan partai politik dan hak-hak warga negara untuk berpartisipasi di dalam Pemilu melalui jalur non-partai juga dijamin, namun demokratisasi seperti itu ternyata tidak

menjamin terwakilnya kepentingan rakyat dalam proses-proses politik yang demokratis.¹⁰

Permasalahan yang sangat kentara adalah ternyata demokrasi yang tumbuh adalah demokrasi berbasis politik transaksional. *Popular democracy* yang didefinisikan secara mekanik dengan sistem suara terbanyak akan menyuburkan potensi terjadinya *vote-buying* sehingga hubungan antara wakil rakyat dan konstituen yang diwakilinya bukan berlandaskan hubungan yang amanah, tetapi lebih pada konteks jual beli suara. Akibatnya, ditengah proses demokratisasi yang terus berlangsung, banyak kalangan yang justru mempertanyakan manfaat dari demokrasi itu sendiri bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Demokrasi dianggap tidak mampu menghasilkan kebijakan publik yang memihak kepada kepentingan rakyat. Demokrasi yang terbentuk adalah demokrasi elitis tanpa memperhatikan keterwakilan publik.

Hal itu terlihat dari perkembangan dinamika politik pada masa 10 tahun terakhir. Hal tersebut dapat kita lihat dari data KPU Sumatera Barat yang diolah dalam tabel 1.2. mengenai tingkat partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir.

¹⁰ Aidinil Zetra dkk(2018). *Pengaruh Partisipasi Politik Terhadap Derajat Political Efficacy dalam Demokrasi Deliberatif Minangkabau*. International Political Sociology. Hlm 2

Tabel 1.2
Data Partisipasi Pilkada Serentak Tahun 2015 Dan PDRB Perkapita
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2014:

No	Kabupaten/Kota	Pemilihan Gubernur	Pemilihan Bupati/Walikota	PDRB Perkapita Kab/Kota 2014
1	Kab. Pesisir Selatan	65.26 %	65.27 %	20.58 %
2	Kab. Solok	56.64 %	56.86 %	26.43 %
3	Kab. Sijunjung	59.54 %	59.90 %	29.97 %
4	Kab. Tanah Datar	55.98 %	55.87 %	26.72 %
5	Kab. Padang Pariaman	54.50 %	54.64 %	35.72 %
6	Kab. Agam	55.55 %	55.13 %	29.95 %
7	Kab. Lima Puluh Kota	61.22 %	61.27 %	29.68 %
8	Kab. Pasaman	69.87 %	69.89 %	22.52 %
9	Kab. Kepulauan Mentawai	64.19 %	-	35.83 %
10	Kab. Dharmasraya	72.91 %	72.90 %	33.05 %
11	Kab. Solok Selatan	68.89 %	68.79 %	24.79 %
12	Kab. Pasaman Barat	65.12 %	65.46 %	26.79 %
13	Kota Padang	52.54 %	-	46.82 %
14	Kota Solok	70.52 %	70.53 %	42.05 %
15	Kota Sawahlunto	53.96%	-	43.71 %
16	Kota Padang Panjang	46.47 %	-	47.09 %
17	Kota Bukittinggi	59.51 %	59.87%	46.83 %
18	Kota Payakumbuh	51.82 %	-	33.26 %
19	Kota Pariaman	52.46 %	-	40.68 %

Sumber: KPU dan BPS Provinsi Sumbar

Berkaca kepada penjelasan di atas, peneliti ingin mengungkap keterkaitan efikasi politik dengan tinggi atau rendahnya partisipasi memilih masyarakat Bukittinggi. Melihat efikasi politik internal memiliki korelasi positif dengan tingkat

pendidikan, motivasi, dan partisipasi politik. Sedangkan efikasi politik eksternal dipengaruhi oleh pengalaman yang didapat ketika berpartisipasi politik sebelumnya, Bukittinggi dalam segi sudut pandang tingkat Pendidikan, ekonomi dan kehidupan sosial budaya tergolong tinggi, hal ini dibuktikan dengan data Produk Domestik Regional Bruto PDRB Bukittinggi tahun 2014 dan di sandingkan dengan partisipasi politik tahun 2015. Dari data di atas terlihat kecenderungan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tidak dipengaruhi oleh tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa daerah yang memiliki PDRB Perkapita yang tinggi namun tingkat partisipasinya rendah seperti Kota Padang memiliki dengan PDRB Perkapita yang tinggi namun partisipasi memilih hanya mencapai angka 52,29 %.

Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Bukittinggi yang terdiri dari dua kategori, yakni Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK). Nilai PDRB kota Bukittinggi dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010. Pada tahun 2010 tercatat nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 3,60 triliun rupiah, kemudian 2011 naik menjadi 4,03 triliun rupiah dan 2015 juga mengalami kenaikan sebesar 8,69 %, yaitu menjadi 6,12 triliun. Nilai PDRB 2015 atas dasar harga konstan tercatat sebesar 4,87 triliun rupiah, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terdapat kenaikan yang cukup berarti.

Pada 2014 nilai PDRB ADHK adalah sebesar 4,59 triliun rupiah. Ini berarti terdapat kenaikan sebesar 6,10 % dibandingkan tahun 2014 tersebut. Sektor yang

paling tinggi memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB kota Bukittinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yaitu sebesar 33,64 % kemudian sektor transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar 10,90 %, serta sektor industri pengolahan sebesar 6,86%. Sementara, sektor yang paling kecil kontribusinya adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,00 %.¹¹ Sehingga, dapat disimpulkan faktor ekonomi juga bukan hal utama yang mempengaruhi rendahnya partisipasi memilih masyarakat Bukittinggi.

Dinamika politik Bukittinggi mengenai partisipasi politik di Kota Bukittinggi naik turun dari setiap pemilihan kepala daerah, baik walikota maupun pemilihan gubernur. Seperti tabel 1.3 mengenai data partisipasi politik kota Bukittinggi pada Pilgub 2005, 2010 dan 2015.

Tabel 1.3.
Data Partisipasi memilih Pemilihan Gubernur di Kota Bukittinggi Tahun 2005, 2010, 2015 dan 2020.

Pilgub 2005	Pilgub 2010	Pilgub 2015	Pilgub 2020
54.17%	61.49%	58.88%	70.32%

Sumber: Data KPU Kota Bukittinggi 2021

Data KPU mengenai partisipasi memilih pada pilgub di Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 15 tahun terakhir mengalami naik turun dalam presentasi partisipasi politik. Hal serupa juga terjadi dalam konteks pemilihan walikota dan wakil walikota Bukittinggi. Berdasarkan data partisipasi Pilwako kota Bukittinggi pada tabel 1.4.

¹¹ Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Kota Bukittinggi (RPIJM) tahun 2017-2021. Diambil dari web https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1502707442_BAB_II_PROFIL_KOTA_BUKIT_TINGGI.pdf. Di akses pada 02 September 2020 pukul 18:48.

Tabel 1.4.
Data Partisipasi memilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Bukittinggi Tahun 2005, 2010, 2015, dan 2020.

Pilwako 2005	Pilwako 2010	Pilwako 2015	Pilwako 2020
54.17%	60.48%	60.49%	72.04%

Sumber: Data KPU Kota Bukittinggi

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang sebelumnya, terdapat pengaruh signifikan efikasi politik internal terhadap partisipasi memilih. Partisipasi politik masyarakat merupakan keterlibatan rakyat secara perseorangan untuk mengerti, menyadari, mengkaji, melobi dan memprotes suatu kebijakan dari pemerintah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap kepentingan mereka. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa salah satu bentuk keterlibatan masyarakat adalah melalui pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebab memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dinilai akan menjalankan roda pemerintahan yang representatif dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat untuk menunaikan hak memilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara yang disebut dengan partisipasi memilih.

Berdasarkan data tingkat partisipasi memilih pada Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota di Sumatera Barat, masyarakat di Kota Bukittinggi memiliki tingkat partisipasi politik yang tergolong rendah dalam penggunaan hak pilih. Hal tersebut dipaparkan dalam tabel 1.5 mengenai Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat (Dari Tahun 2005-2008).

Tabel 1.5.
Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota di Provinsi Sumatera Barat (Dari Tahun 2005-2008).

No	Kota	Pengguna Hak Pilih		Tidak Menggunakan Hak Pilih		DPT
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Kota Solok	22.006	60.12	14.593	39.87	36599
2	Kota Bukittinggi	37.853	52.83	33.791	47.16	71644
3	Kota Payakumbuh	51.286	70.22	21.746	29.77	73032
4	Kota Sawahlunto	30.249	79.57	7.767	20.43	38016
5	Kota Padang Panjang	20.188	66.40	10.179	33.50	30367
6	Kota Pariaman	39.059	74.90	13.012	25.10	52071
7	Kota Padang	309.486	57.15	231.987	42.85	541473

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa tingkat partisipasi memilih pada Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota di Sumatera Barat berbeda antara satu dengan lainnya. Hal tersebut mendeskripsikan tingkat partisipasi politik masyarakat juga berbeda dan cenderung rendah.

Penelitian ini memfokuskan pembahasan efikasi politik dan partisipasi memilih, khususnya pada kota Bukittinggi, rendahnya partisipasi memilih pada konteks pilkada dari tahun ketahun menjadi fokus pembahasan penelitian ini, Dari penjelasan yang terdapat di latar belakang dan rumusan masalah, dapat dibuktikan bahwasanya, kota Bukittinggi dapat tergolong memiliki efikasi politik yang tinggi,

baik secara internal maupun eksternal tidak memiliki pengaruh terhadap tingginya partisipasi memilih yang ada. Hal ini bertentangan dengan pandangan-pandangan yang terdapat dalam penelitian-penelitian terdahulu bahwasanya efikasi politik yang tinggi mengakibatkan tingginya partisipasi politik di suatu daerah.

Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana pengaruh efikasi politik terhadap partisipasi memilih masyarakat di Kota Bukittinggi.?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh efikasi politik internal dan efikasi politik eksternal terhadap tingkat partisipasi memilih warga kota Bukittinggi .

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi Dalam menjelaskan pengaruh efikasi politik terhadap partisipasi memilih di kota kecil dengan kecenderungan partisipasi dalam memilih yang semakin lama semakin menurun.
- 2) Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai efikasi politik dan partisipasi politik.

